

DAFTAR BACAAN

1. BUKU

- Abdulkadir Muhammad ,1982, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni, Bandung
- Bakarbessy, Leonora et al.,2011, Buku Ajar Hukum Perikatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- B. Wibowo and I. Krisnadi , 2016,“Analisa regulasi fintech dalam perekonomian di Indonesia”.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, cet. II*, Sinar Grafika, Jakarta
- Endang Purwaningsih, 2010 , Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Gatot Supramono,2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2, Jakarta: KENCANA.
- Iswi Hariyani, R.Serfianto, 2010 (a), *Bebas Jeratan Utang Piutang*,cetakan pertama.Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- J Satrio, 1999 , Hukum Perikatan Pada Umumnya (Bandung : Alumni
- Jhonny Ibrahim,2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing : Malang
- Subekti,2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa),
- Muhamad Djumhana, 2000, “Hukum Perbankan di Indonesia”, cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

M Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia),

Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Ridwan Khairandy, 2004, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah UU ITE Nomor 19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Peraturan OJK Nomor 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20/2016)

3. JURNAL HUKUM

Alficha Rezita Sari, 2018, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*”, *Skripsi Program Studi (SI) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*,

Darl John Rasuh, “*Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata*,” *Jurnal Lex Privatum*, 9 Juni 2020 ,

Tami Rusli, “*Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Pembiayaan Konsumen Melalui Jasa Pihak Ketiga*”, *Jurnal Pranata Hukum* 1 Januari 2009

Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, “*Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank*,” *Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta*,

4. INTERNET

Bibow, Jorg. *Keynes on Monetary Policy, Finance and Uncertainty: Reassessing Liquidity Preference Theory*, (New York: Routledge, 2009).

Sitorus, R. (2019, Agustus 22). *Baru 127 Fintech Resmi Terdaftar di OJK, Ini Rinciannya*. *bisnis.com*:

<https://finansial.bisnis.com/read/20190822/90/1140038/baru-127-fintech-resmi-terdaftar-di-ojk-ini-rinciannya> (diakses pada Desember 14, 2019)